



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Sisingamangaraja No. 5 Semarang 50232
Telepon (024) 8412547, Faksimili (024) 8412548

<https://jateng.kemenag.go.id>, email : kanwiljateng@kemenag.go.id

LAPORAN
TENTANG
PERAN PIMPINAN DALAM PEMBANGUNAN PMPZI
MENUJU SATUAN KERJA WBK/WBBM
Pada Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan predikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat menuju WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Untuk memastikan bahwa satuan kerja/UPT telah memenuhi syarat minimal WBK/WBBM maka perlu dilakukan pembinaan, penilaian pendahuluan Tim RB Unit Eselon I, TPI dan TPN.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Mengakselerasi implementasi reformasi birokrasi pada Satker di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah melalui pembangunan Zona Integritas.

b. Tujuan Kegiatan

Mewujudkan target pada Satker di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah memperoleh predikat WBK/WBBM dengan membentuk Tim Kerja PMPZI

3. Ruang Lingkup

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

4. Dasar

1. Perpres Nomor 81 tentang Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
2. Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenpan dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah
3. Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024
4. Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
5. KMA Nomor 633 Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama
6. KMA Nomor 635 Tahun 2020 Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Agama

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Rapat Koordinasi Kakanwil kepada Seluruh Kepala Kankemenag dalam rangka Evaluasi capaian kerja Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

C. Hasil yang Dicapai

Telah ditindaklanjuti oleh satker dalam pembangunan pelaksanaan PMPZI oleh Tim Kerja PMPZI di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

D. Simpulan dan Saran

Data Dukung Pembangunan Zona Integritas segera dilengkapi untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

E. Penutup

Hasil input Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada aplikasi dan Laporan Pembangunan ZI pada satker di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah oleh Tim Kerja PMPZI

Dibuat di Semarang
Pada tanggal 30 November 2020
Kasubbag Ortala dan KUB,

TTD

Nurkholis

DOKUMENTASI :



HASIL EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAKSANAAN PMPZI PADA KANWIL & KANKEMENAG KAB/KOTA TAHUN 2020



42,14%

No	KANWIL KEMENAG PROVINSI	JUMAH SATKER	PELAKSANAAN PMPZI				No	KANWIL KEMENAG PROVINSI	JUMAH SATKER	PELAKSANAAN PMPZI			
			SUDAH	%	BELUM	%				SUDAH	%	BELUM	%
1	ACEH	24	2	8,33	22	91,67	18	KEPULAUAN RIAU	8	7	87,50	1	12,50
2	BALI	10	9	90,00	1	10,00	19	LAMPUNG	16	13	81,25	3	18,75
3	BANGKA BELITUNG	8	7	87,50	1	12,50	20	MALUKU	12	1	8,33	11	91,67
4	BANTEN	9	2	22,22	7	77,78	21	MALUKU UTARA	11	1	9,09	10	90,91
5	BENGKULU	11	7	63,64	4	36,36	22	NUSA TENGGARA BARAT	11	0	-	11	100,00
6	D.I YOGYAKARTA	6	5	83,33	1	16,67	23	NUSA TENGGARA TIMUR	20	3	15,00	17	85,00
7	DKI JAKARTA	7	6	85,71	1	14,29	24	PAPUA	29	0	-	29	100,00
8	GORONTALO	7	4	57,14	3	42,86	25	PAPUA BARAT	12	0	-	12	100,00
9	JAMBI	12	4	33,33	8	66,67	26	RIAU	13	3	23,08	10	76,92
10	JAWA BARAT	28	11	39,29	17	60,71	27	SULAWESI BARAT	7	7	100,00	0	-
11	JAWA TENGAH	36	36	100,00	0	-	28	SULAWESI SELATAN	24	0	-	24	100,00
12	JAWA TIMUR	39	27	69,23	12	30,77	29	SULAWESI TENGAH	14	7	50,00	7	50,00
13	KALIMANTAN BARAT	15	11	73,33	4	26,67	30	SULAWESI TENGGARA	18	4	22,22	14	77,78
14	KALIMANTAN SELATAN	14	2	14,29	12	85,71	31	SULAWESI UTARA	16	0	-	16	100,00
15	KALIMANTAN TENGAH	15	12	80,00	3	20,00	32	SUMATERA BARAT	20	20	100,00	0	-
16	KALIMANTAN TIMUR	11	4	36,36									
17	KALIMANTAN UTARA	6	4	66,67									

Sumber: pmpzi.kemenag.go.id, Tanggal 6 Desember 2020

